



# RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU

2025 - 2026



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala Pengetahuan dan Kemudahan yang selalu tercurahkan kepada kami, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 –2026 bisa terselesaikan.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah dalam menyukseskan pembangunan di Provinsi Maluku, maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025–2026 merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026 ini, pada prinsipnya disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tetap memiliki acuan mengenai strategi dan kebijakan operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai upaya mewujudkan organisasi yang terdepan untuk optimalisasi pelayanan administrasi Pendapatan Daerah dalam menunjang kebijakan fiskal daerah yang tercukupi untuk pelaksanaan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Stratetgis (RENSTRA) ini sangat ditentukan sejauhmana tekad, semangat dan kebersamaan dari segenap aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan para stakeholder, sehingga dokumen ini

diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan utama dalam proses perencanaan pendapatan daerah.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.

Semoga menjadi bagian dari amal ibadah seluruh tim penyusun, serta dapat memberikan kontribusi optimal untuk mewujudkan Tema Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 yaitu **“MALUKU MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.

Ambon, Maret 2024

**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Maluku**



**INA WATI TAHIR, SE.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19780924 200112 2 002

## DAFTAR ISI

### RENCANA STRATEGIS BAPENDA PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
Daftar Tabel.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah .....	34
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>40</b>
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
3.2. Isu-isu Strategis .....	41
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026.....	50
4.2. Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Tujuan Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> serta indikatornya .....	52
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>53</b>
5.1. Strategi.....	53
5.2. Arah Kebijakan .....	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN.....</b>	<b>94</b>

<b>7.1. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....</b>	<b>94</b>
<b>7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). ....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>98</b>

## Daftar Tabel

1. Tabel 1 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Status Kepegawaian.....	34
2. Tabel 2 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Eselon Tahun 2024.....	34
3. Tabel 3 Data Pegawai Badan Pendaptan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024.....	35
4. Tabel 4 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	35
5. Tabel 5 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Badan / UPTD .....	36
6. Tabel 6 Data ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Yang Telah Mengikuti DIKLAT .....	37
7. Tabel 7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Sebelum Perubahan).....	38
8. Tabel 8 ( T-C.23.A) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku(Sesudah Perubahan).....	38
9. Tabel 9 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku .....	39
10. Tabel 10 (Tabel T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	40
11. Tabel 11 (Tabel 35-2) Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku .....	45
12. Tabel 12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 .....	51
13. Tabel 13 Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku .....	52
14. Tabel 14 Matriks SWOT.....	55
15. Tabel 15 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Bapenda Provinsi Maluku .....	55
16. Tabel 16 Analisis Strategi (solusi) dari kendala yang ada dengan menggunakan Matriks SWOT.....	57
17. Tabel 17 (tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	58

18. Tabel 18 (T-C.27.) Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah .....	63
19. Tabel 19 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	95
20. Tabel 20 (Tabel T-C.28) INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	96
21. Tabel 21 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku .....	97

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Menjelang berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 2019-2024, maka dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berkewajiban menyusun Rencana Strategis 2025-2026 untuk menentukan arah, tujuan, langkah kebijakan operasional yang akan dicapai dalam jangka waktu periodik satu tahun transisi perencanaan daerah yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 2025-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah memuat visi, misi, tema, tujuan, kebijakan, indikator, dan sasaran strategis serta program prioritas pembangunan yang disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, serta wajib bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku 2025-2026.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu tahun pembangunan. Penyusunannya melalui proses sistematis yang berkelanjutan dengan mempedomani semua regulasi terkait, memanfaatkan pengetahuan arah pembangunan yang futuristic, mengukur *output* dan *outcome*, memperhitungkan potensi sumber daya daerah, menganalisis evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2024, mengoptimalkan peluang pengembangan, serta mengantisipasi kendala dan hambatan.

Disisi lain, kebijakan desentralisasi memberikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai unsur lini Pemerintah daerah harus mampu mengimplementasi tugas pokok dan fungsi dalam sasaran strategis dan program prioritas guna mengoptimalkan semua sumber daya daerah secara efektif yang bermuara pada meningkatnya pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyajian data absolut terkait potensi, kondisi, kebutuhan dan kontribusi daerah yang berimplikasi pada rasionalitas perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, serta Hibah. yang bermuara pada ketersediaan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033;
  16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020);
  17. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini, dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan pendapatan dan pertanggungjawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai dengan komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun kedepan.

### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah bertujuan:

- a. Menjadi acun resmi bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan dua tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah setiap tahun;
- c. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama 2 (dua) tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara sistematis terhadap RENSTRA OPD ini, akan dikemukakan pokok-pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan lainnya yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Provinsi Tahun 2025 – 2026.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Badan Pendapatan Daerah.

### **1.4 Sistematika penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pemebentukan Badan Pendapatan Daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan Pendapatan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personal, dan tata laksana Badan Pendapatan Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Pendapatan Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan.

### **3.2. Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku/Kabupaten/Kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
- implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2025 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada :**

- a) Tujuan dan Sasaran RPD
- b) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

### **4.2. Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Mulai dari Tujuan, Sasaran, *Outcome* dan *Output* serta indikatornya masing-masing**

## **BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada permendagri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, dan pemutakhirannya).

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dua tahun mendatang.**
- 7.2. Penentuan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

## **BAB VIII PENUTUP**

Menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut Badan Pendapatan Daerah.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

#### **2.1.1. Tugas Pokok**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku, mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan melaksanakan APBD.

#### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dan RPJMD;
- b. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
- d. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pengawasan dibidang Pendapatan Daerah;
- e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait;
- i. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

#### A. Kepala Badan Pendapatan Daerah:

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapatan daerah provinsi maluku sesuai tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- i. memantau layanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui sekretaris daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **B. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah:**

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai rencana operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c) membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- f) mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) menyusun program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) mengelola penatausahaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h) melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- i) menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan keuangan;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. Kepala Bidang Pajak Daerah**

Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Operasional, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pajak

- Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pajak Daerah di Bantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional
2. Kepala Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. KepalaSub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.

**a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional**

Sub Bidang Pengendalian Operasional pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai rencana operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengendalian Operasional, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**b. Kepala Sub Bidang Bea Balik Nama–Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor**

Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan

Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f) melaksanakan koordinasi terkait penetapan jenis-jenis pajak dan tagihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Kepala Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.**

Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak

Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) melakukan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta data pajak yang akurat dan berkualitas;
- g) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kepala Bidang Retribusi Daerah**

Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan penerimaan retribusi, penerimaan Badan Usaha Milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi realisasi penerimaan retribusi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh bahan laporan yang lebih akurat dan berkualitas

- h) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
  - j) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis
- Kepala Bidang Retribusi dibantu oleh:
1. KepalaSub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
  2. KepalaSub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
  3. KepalaSub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

**a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi**

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan penerimaan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan

Penerimaan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi;
- h) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah**

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **E. Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain**

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendapatan lain-lain, dana perimbangan serta rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat

- dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas desentralisasi pengelolaan dana perimbangan dan peningkatan pendapatan keuangan daerah melalui sumber pendapatan lain-lain sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
2. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan
3. KepalaSub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan.

#### **a. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain**

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendapatan lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membimbingbawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**b. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan**

Sub Bidang Dana Perimbangan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dana perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengelolaan transfer dana pusat ke daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) melakukan koordinasi ke Kementerian/Lembaga/instansi terkait dalam rangka pengelolaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan

kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan**

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f) mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g) mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i) membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **F. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan.**

Untuk melaksanakan pemungutan Pajak-Pajak Daerah yang ada di Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, serta dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada wajib Pajak, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah membentuk 12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang terdiri dari :

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon;
4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;
5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;

6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Banda;
7. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
9. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
10. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
11. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Tual di Tual;
12. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur.

Diantara ke-12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan tersebut diatas, terdapat beberapa UPTD yang saat ini telah berstatus *Mandiri*, yaitu:

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;
4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana dan program pengembangan kegiatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- d. Menyusun data potensi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja lingkup Badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- f. Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;

- g. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan dibantu oleh:

1. Kepala *Sub Bagian Tata Usaha*
2. Kepala *Seksi Penetapan dan Penagihan*

#### **a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Dalam Rangka membantupenyelenggaraan pelayanan teknis administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPTD.
- b) Menyusun rencana teknis operasional program pembinaan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan.
- c) Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja UPTD.
- d) Menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan UPTD.
- e) Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisa jabatan.
- f) Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharannya.
- g) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h) Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Unit.
- j) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan**

Dalam rangka membantu pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana dan program pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- b) Menyusun pedoman penyuluhan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- c) Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk fasilitasi Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan dan melaksanakan pungutan pendapatan daerah, pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
- e) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
- f) Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- g) Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah Seksi Penetapan dan Penagihan.
- h) Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberi petunjuk/ arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 175 (seratus tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari PNS, PNS Titipan dan pegawai Honorer, yang tersebar juga pada 12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di seluruh Provinsi Maluku, yang berlatar belakang pendidikan mulai SMP, SMA, D3, D4, S1, S2 dan S3, untuk lebih jelas dapat di lihat dalam uraian sebagai berikut:

*Tabel 1 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024*

<b>NO.</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	A S N	95 orang
2.	ASN TITIPAN	1 Orang
3.	NON ASN	78 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>174 Orang</b>

*Tabel 2 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Menurut Eselon Tahun 2024*

<b>NO.</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	15 Orang
3.	Eselon IV	31 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>47 Orang</b>

Tabel 3 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	6 Orang
2.	Pembina (IV/a)	9 Orang
3.	Penata Tingkat I (III/d)	36 Orang
4.	Penata (III/c)	14 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	19 Orang
6.	Penata Muda (III/a)	4 Orang
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4 Orang
8.	Pengatur (II/c)	2 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
10.	Pengatur Muda (II /a)	1 Orang
11.	Juru Tk.I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 4 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Doktoral/ S3	-
2.	Pasca Sarjana/ S2	28 Orang
3.	Sarjana / S1	50 Orang
4.	Diploma-IV	4 Orang
5.	Diploma-III	3 Orang
7	SLTA	9 Orang
8	SLTP	1 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 5 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Berdasarkan Badan / UPTD

Tahun 2024

UNIT KERJA	ASN	ASN / TITIPAN	P3K	HONORER	TOTAL
Bapenda	46 Orang	1 Orang	1 Orang	29 Orang	77 Orang
UPTD Kota Ambon	17 Orang	-	-	13 Orang	30 Orang
UPTD Kota Tual	2 Orang	-	-	2 Orang	4 Orang
UPTD Langgur	3 Orang	-	-	2 Orang	5 Orang
UPTD Namlea	4 Orang	-	-	7 Orang	11 Orang
UPTD Namrole	3 Orang	-	-	3 Orang	6 Orang
UPTD Masohi	3 Orang	-	-	4 Orang	7 Orang
UPTD Banda	2 Orang	-	-	1 Orang	3 Orang
UPTD Dobo	4 Orang	-	-	4 Orang	8 Orang
UPTD Saumlaki	4 Orang	-	-	3Orang	7 Orang
UPTD Piru	4 Orang	-	-	3 Orang	7 Orang
UPTD Bula	1 Orang	-	-	4 Orang	5 Orang
UPTD Tiakur	2 Orang	-	-	3 Orang	5 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>95 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>78 Orang</b>	<b>175 Orang</b>

Tabel 6 Data ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Yang Telah Mengikuti DIKLAT  
Struktural/d Tahun 2024

UNIT KERJA	PIM II	PIM III	PIM IV	TOTAL
BAPENDA	-	4 Orang	5 Orang	9 Orang
UPTD Kota Ambon	-	1 Orang	3 Orang	4 Orang
UPTD Kota Tual	-	-	1 Orang	1 Orang
UPTD Langgur	-	-	-	-
UPTD Namlea	-	-	-	-
UPTD Namrole	-	-	1 Orang	1 Orang
UPTD Masohi	-	-	1 Orang	1 Orang
UPTD Banda	-	1 Orang	-	1 Orang
UPTD Dobo	-	1 Orang	-	1 Orang
UPTD Saumlaki	-	-	1 Orang	1 Orang
UPTD Piru	-	1 Orang	1 Orang	2 Orang
UPTD Bula	-	-	1 Orang	1 Orang
UPTD Tiakur	-	-	1 Orang	1 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>8 Orang</b>	<b>15 Orang</b>	<b>23 Orang</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dapat digambarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Sebelum Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase Peningkatan PAD				2%	5,05%	2%	1,5%	2%	13,12%	0,60%	16,20%	5,89%		656%	11,83%	798%	393%	
2	Survey Kepuasan Masyarakat				B	B	B	B	A	B	B	B	E		100%	100%	100%	50%	

Untuk target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam Renstra Tahun 2025-2026 terdapat beberapa penyesuaian dan penyelarasan indikator kinerja. Hal ini sinergi dengan indikator sasaran pada Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Tabel 8 ( T-C.23.A) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku(Sesudah Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -	
					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektifitas Pendapatan Daerah				97,7%	98%
2	Indeks Pelayanan Publik				B	B
3	Nilai SAKIP				B	B

Tabel 9 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU</b>	53.520.578.503,00	48.872.240.958,00	48.244.941.270,00	37.531.708.178,00	45.105.972.726,00	46.206.017.775,00	44.076.454.718,34	-	84,28%	94,54%	91,36%	-	-10,7%	-1,09%
Program Peninjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	39.493.625.834,00	36.886.869.095,00	37.862.249.921,00	33.351.140.678,00	34.006.570.083,00	35.380.873.405,00	34.887.048.527,00	-	86,11%	95,92%	92,14%	-	-5,3%	1,32%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.120.282.054,00	1.199.826.716,00	1.350.000.000,00	611.464.000,00	992.698.266,00	1.167.688.195,00	1.303.709.053,00	-	88,61%	97,32%	96,57%	-	-11,7%	14,64%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.906.671.615,00	10.785.545.147,00	9.032.691.349,00	3.569.103.500,00	10.106.704.377,00	9.657.965.775,00	7.885.697.138,00	-	78,31%	89,55%	87,30%	-	-31,1%	-11,40%

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, harusnya dipandang sebagai momentum untuk lebih mengupayakan kemandirian fiskal setiap daerah. Untuk itu, maka sudah sewajarnya Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Maluku dan juga selaku perangkat daerah yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat perlu mengembangkan strategi yang tepat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan pemerintahan bidang pendapatan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi, maka identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi perhatian dan prioritas untuk ditindaklanjuti baik jangka pendek maupun jangka menengah melalui Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, tampak pada Tabel T-B.35 di bawah ini :

*Tabel 10 (Tabel T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah*

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Pendapatan Daerah	Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana Transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi kantor UPTD Pelayanan Pendapatan masih belum memberikan kenyamanan dalam pembayaran pajak;</li> <li>• Belum terlaksananya pengembangan sistem yang mampu mengakomodir kanal-kanal pembayaran non tunai;</li> <li>• Sistem pengawasan digital yang belum begitu menyeluruh dalam mengeliminasi tantangan letak geografis Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan, serta kurangnya</li> </ul>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			<p>kapasitas SDM yang berwawasan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapatnya Aset Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</li> <li>• Belum adanya standarisasi pembagian deviden berdasarkan besaran penyertaan modal daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</li> <li>• Tata cara perhitungan alokasi dana transfer yang belum menguntungkan Daerah, Khususnya Maluku sebagai Provinsi Kepulauan;</li> <li>• Perlunya pemenuhan kriteria kinerja utama sebagai parameter utama alokasi Dana Insentif Daerah (DID).</li> </ul>
2.	Belum Maksimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	Belum Terselenggaranya kinerja pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sesuai standar pelayanan minimal serta kondisi ideal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana dan Manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal.</li> </ul>

### 3.2. Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana

Transfer, serta menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar dalam aturan yang berlaku. Untuk itu perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah perlu memperhatikan beberapa acuan sebagai berikut :

### **3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pembinaan, serta pengendalian pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, termasuk didalamnya melaksanakan pemungutan pendapatan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menemui beberapa hal yang mengakibatkan belum optimalnya pendapatan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini diharapkan dapat diatasi dimasa yang akan datang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dimaksimalkan.

Adapun faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah antara lain :

- a. Kondisi kantor UPTD Pelayanan Pendapatan masih belum memberikan kenyamanan dalam pembayaran pajak;
- b. Belum terlaksananya pengembangan sistem yang mampu mengakomodir kanal-kanal pembayaran non tunai;
- c. Sistem pengawasan digital yang belum begitu menyeluruh dalam mengeleminasi tantangan letak geografis Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan digital.
- d. Masih terdapatnya Aset Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD;
- e. Belum adanya standarisasi pembagian deviden berdasarkan besaran penyertaan modal daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- f. Tata cara perhitungan alokasi dana transfer yang belum menguntungkan Daerah, Khususnya Maluku sebagai Provinsi Kepulauan;
- g. Perlunya pemenuhan kriteria kinerja utama sebagai parameter utama alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
- h. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana Prasarana dan Manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara maksimal.

### **3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian/Lembaga**

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsinya sebagai pemungut pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku harus mengacu pada rencana strategi Kementerian dan Lembaga yang menangani sektor pemerintahan dan jasa serta ekonomi produktif. Kementerian Dalam Negeri yang menangani urusan pemerintahan merupakan institusi sebagai induk administrasi pemerintahan dalam negeri yang visi dan misinya menjadi acuan dalam merumuskan Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

*“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.*

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri juga telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah dan RPJMD;
2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
5. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan

Keterkaitan antara Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan Kementerian Dalam Negeri adalah sama – sama mendorong terwujudnya *tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik* sebagaimana pada Tabel 35-2. (Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku) berikut ini :

Tabel 11 (Tabel 35-2) Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku

Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi Maluku 2025 – 2026	TUPOKSI	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Renstra Kementerian Dalam Negeri,</p> <p>Visi :</p> <p>Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros jalannya Pemerintahan dan Politik, Menegakkan Demokrasi, dan Menjaga Integritas Bangsa.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;</li> <li>2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.</li> <li>3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel.</li> <li>4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan Pembangunan antar wilayah dan daerah melalui</li> </ol>	<p>Tugas Pokok :</p> <p>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA PROMAL) mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, dan Pelaksanaan APBD.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah dan RPJMD;</li> <li>2. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;</li> <li>3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah;</li> </ol> <p>Pembinaan Teknis di bidang Pendapatan Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;</li> <li>5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li> <li>6. Pelaksanaan Ketatausahaan;</li> </ol> <p>Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana Transfer;</li> <li>2. Belum Terselenggaranya kinerja pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sesuai standar pelayanan minimal serta kondisi ideal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terkelola secara optimal;</li> <li>2. Alokasi Dana Transfer yang terbatas;</li> <li>3. Keterbatasan SDM, Keuangan, sarana prasarana dan sistem pendukung yang ditujukan untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Pembayaran Pajak dan Retribusi;</li> <li>2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang semakin baik;</li> <li>3. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif;</li> <li>4. Tersedianya SDM dan Sarana Prasarana yang memadai sampai Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Inovasi penggalian objek baru.</li> </ol>

Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi Maluku 2025 – 2026	TUPOKSI	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif, dengan didukung aparatur yang berkomitmen dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public.				

### **3.23 Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Sejalan dengan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Renstra tahun 2025-2026 mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai berikut :

Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau, dikelompokan dalam 12 gugus pulau dan terbagi dalam 11 wilayah administrasi, dalam konteks kontribusi pendapatan membutuhkan infrastruktur telekomunikasi, perhubungan, sistim perbankan yang tersebar pada 11 Kab/ Kota, SDM yang memahami teknologi Informatika dan kemampuan manajerial mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan sampai pada pelosok pulau terkecil untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi kepada daerah.

Keterkaitan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, terutama pada saat koordinasi awal untuk setiap investor yang akan mengeksploitasi potensi sumber daya alam di wilayah Maluku.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang hadapi di tengah masyarakat. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat melakukan upaya pengalihan objek baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan inovasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak retribusi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tersedia dengan menyesuaikan spesifikasi sesuai perkembangan teknologi sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Untuk itu perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah perlu memperhatikan beberapa acuan sebagai berikut :

- a. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;

Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pembinaan, serta pengendalian pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, termasuk didalamnya melaksanakan pemungutan pendapatan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

b. RENSTRA Kementerian Dalam Negeri;

Keterkaitan antara Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan Kementerian Dalam Negeri adalah sama – sama mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

c. RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai :

- Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Pendapatan Provinsi Maluku terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

- Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dikelola secara optimal;
- Alokasi Dana Transfer yang terbatas;
- Keterbatasan SDM, Keuangan, sarana prasarana dan sistem pendukung yang ditujukan untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara optimal.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah yaitu :

- Sosialisasi Peraturan Pembayaran Pajak dan Retribusi;
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang semakin baik;
- Stabilitas Keamanan Daerah yang Kondusif;
- Tersedianya SDM dan Sarana Prasarana yang memadai sampai ke Kabupaten/Kota;

- Inovasi Penggalian Objek Baru.
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan pendapatan Daerah;  
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pendapatan  
Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan badan Pendapatan Daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, terutama pada saat koordinasi awal untuk setiap investor yang akan mengeksplorasi potensi sumber daya alam di wilayah Maluku.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan untuk mengakselerasi peningkatan Pendapatan Daerah dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, yang diantaranya adalah :

- a. Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan daerah dalam melayani wajib pajak.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak.
- d. Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang belum optimal.
- e. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah.
- f. Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.
- g. Maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan Institusi.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026

#### a) Tujuan dan Sasaran RPD

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara khusus, tema pembangunan tahun 2025 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 dan momentum/fondasi bagi perwujudan RPJPD 2025 – 2045.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sinergis dengan prioritas pembangunan **“Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif”**. Hal ini berhubungan dengan fungsi-fungsi pelayanan publik dalam menunjang program-program pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah serta alokasi dana transfer.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut: **“Maluku Maju dan Berkelanjutan”** untuk mewujudkan tema tersebut maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- b) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- c) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk;
- d) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
- e) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Khusus dalam Renstra ini, penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dua tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Misi ke-1 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**, dengan sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

**b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah**

Tabel 12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %	98 %
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	B	B
			Nilai SAKIP	B	B

#### 4.2. Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Tujuan Sasaran, *Outcome* dan *Output* serta indikatornya

Tabel 13 Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KONDISI AWAL (2023)	TARGET	
						2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,7 %	98%
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,7 %	98%
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik		B	B
		Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip		B	B

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi Pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode 2 tahun dalam RPD ini);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Salah satu alat analisis yang dapat dikembangkan sebagai upaya menentukan strategi adalah analisis SWOT, yang banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan strategis pemerintahan. Analisis ini bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang, menengah maupun pendek sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan. Analisis SWOT adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi guna menentukan faktor unggulan dan strategi interaksi efektif yang tepat dilakukan dalam mencapai sukses yang lebih besar.

Konsep analisis SWOT bahwa siapa yang dapat memadukan atau menciptakan interaksi efektif antara kekuatan dengan peluang dan meminimalkan kelemahan dengan ancaman akan memiliki keunggulan meraih sukses yang lebih besar. Dengan membangun interaksi yang efektif antara faktor kunci sukses akan tercipta sinergi dalam meraih peluang atau tujuan organisasi.

Analisis SWOT diawali dengan identifikasi faktor-faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) dimana hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sasaran-sasaran dan perumusan dari strategi yang dimaksud.

Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2025 -2026, agar dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, langkah yang diambil yaitu dengan mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal sehingga akan menghasilkan strategi SO, ST, WO dan WT.

Untuk mendapatkan isu-isu strategis dari perpaduan antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam lingkungan internal serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Matriks SWOT

<b>INTERNAL</b>	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
<b>EKSTERNAL</b>	Tentukan 3 - 5 faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan 3 - 5 faktor-faktor kelemahan internal
<b>OPPORTUNIES (O)</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
Tentukan 3 - 5 faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>TREATHS (T)</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
Tentukan 3 – 5 faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2008:31) (data diolah)

Tabel 15 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Bapenda Provinsi Maluku

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Indikator Kekuatan (Strength - S)		Indikator Peluang (Opportunity - O)	
1	<b>Dari Aspek Regulasi, Tersedianya Regulasi dalam Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Maluku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024</li> <li>• Peraturan Daerah Promal Nomor 12 tahun 2024</li> </ul>	1	<b>Adanya kolaborasi bersama Stakeholders terkait yang mendukung pengelolaan pendapatan daerah.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirlantas Polda Maluku</li> <li>• Jasa Raharja</li> <li>• Bank Maluku</li> <li>• Kabupaten/ Kota</li> </ul>
2	<b>Dari Aspek Kelembagaan Bapenda Promal memiliki Sarana Prasarana Aparatur, SOTK &amp; TUPOKSI yang jelas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatur berjumlah 175 orang (terdiri dari PNS 95 orang, P3K 1 orang, dan Honorer 78 orang)</li> <li>• Sarana dan Prasarana pada 12 Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar di 11 Kab/kota.</li> </ul>	2	<b>Kerjasama Penggunaan Teknologi digital berbasis pengelolaan PAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan Vendor untuk Pengembangan Sistem Pajak Daerah dan retribusi daerah.</li> <li>• Adanya dukungan dari pihak perbankan dan modern channel (kanal pembayaran digital berbasis non tunai)</li> </ul>
3	<b>Tersedianya Sistem E-SAMSAT Provinsi Maluku sebagai Sarana Digital Pemungutan Pajak Daerah</b>	3	<b>Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan public yang semakin berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau.</b>

4	Adanya Dukungan yang sangat kuat dari Gubernur dan DPRD kepada Badan pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan mendorong inovasi pelayanan publik.	4	Terjaganya stabilitas ekonomi daerah serta pertumbuhan positif Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
<b>Indikator Kelemahan (Weaknes -W)</b>		<b>Indikator Ancaman (Threats - T)</b>	
1	Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan digital serta menyelenggarakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.	1	Letak dan Kondisi Geografi Provinsi Maluku yang Berbentuk Kepulauan, dengan daya jangkau pelayanan yang cukup kompleks.
2	Belum terstandarisasinya sarana dan prasarana kerja di setiap UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah yang tersebar diseluruh 11 Kab/Kota di Maluku.	2	Dinamika Regulasi dan Ekonomi Nasional
3	Belum efektifnya forum koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.	3	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pajak, dengan mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.
4	Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang terpadu dan benar-benar akurat serta teruji.	4	Belum meratanya kondisi infrastruktur serta transportasi publik, terutama akses jalan kendaraan yang berkondisi baik. Hal ini berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan publik.

Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi dari faktor-faktor: strategi Strengths Opportunities (SO), Strengths Threats (ST), Weaknesses Opportunities (WO) dan Weaknesses Threats (WT). Hasil analisa ini merupakan solusi dari kendala-kendala yang terdapat pada organisasi sehingga rumusan strategi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Analisis Strategi (solusi) dari kendala yang ada dengan menggunakan Matriks SWOT.

<p><b>Internal</b></p> <p><b>Eksternal</b></p>	<p><b>STRENGTHS (S)</b></p>	<p><b>WEAKNESSES (W)</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Aspek Regulasi, Tersedianya Regulasi dalam Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Maluku;</li> <li>2. Dari aspek Kelembagaan Bapenda Promal memiliki sarana prasarana, Aparatur, SOTK &amp; TUPOKSI yang jelas;</li> <li>3. Tersedianya Sistem E-SAMSAT Provinsi Maluku sebagai Sarana Digital Pemungutan Pajak Daerah;</li> <li>4. Adanya Dukungan yang sangat kuat dari Gubernur dan DPRD kepada Badan pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan mendorong inovasi pelayanan publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan digital serta menyelenggarakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah. sesuai Bidang kerjanya;</li> <li>2. Belum terstandarisasinya sarana dan prasarana kerja di setiap UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah yang tersebar diseluruh 11 Kab/Kota di Maluku;</li> <li>3. Belum efektifnya forum koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;</li> <li>4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah yang terpadu dan benar-benar akurat serta teruji.</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNIES (O)</b></p>	<p><b>STRATEGI SO</b></p>	<p><b>STRATEGI WO</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kolaboarasi bersama stakeholders terkait yang mendukung pengelolaan pendapatan daerah;</li> <li>2. Kerjasama Penggunaan Teknologi digital berbasis pengelolaan PAD;</li> <li>3. Semakin tingginya ekspektasi masyarkat terhadap pelayanan public yang semakin berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau.;</li> <li>4. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah serta pertumbuhan positif Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p>Meningkatkan Efektivitas Pendapatan Daerah Melalui kolaboarasi dan sinergitas.</p>	<p>Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur Penunjang pelayanan publik.</p>
<p><b>TREATHS (T)</b></p>	<p><b>STRATEGI ST</b></p>	<p><b>STRATEGI WT</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak dan Kondisi Geografi</li> <li>2. Provinsi Maluku yang Berbentuk Kepulauan, dengan daya jangkau pelayanan yang cukup kompleks;</li> <li>3. Dinamika Ekonomi Nasional</li> <li>4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pajak, dengan mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.</li> </ol>	<p>Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah kepada masyarakat secara masif, dengan memanfaatkan media digital.</p>	<p>Menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel;</p>

Sumber : Rangkuti (2008:31- data diolah)

## 5.2. Arah Kebijakan

Tabel 17 (tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tema RPD :		Maluku Maju dan Berkelanjutan		
Prioritas Pembangunan: 1		Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.	1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui kolaboarasi dan sinergitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akurasi basis data Pajak daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD;</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;</li> <li>4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders yang terkait dalam Rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pelayanan;</li> <li>5. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Transfer;</li> <li>6. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.</li> </ol>

<b>Tema RPD :</b>	<b>Maluku Maju dan Berkelanjutan</b>			
<b>Prioritas Pembangunan: 1</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif</b>			
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			2. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah kepada Perangkat Daerah pemungut dan masyarakat secara masif, dengan memanfaatkan media digital;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah baru Kepada Perangkat Daerah Pemungut dan Masyarakat secara hybrid;</li> <li>2. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemantauan, pembinaan dan Razia Pajak Daerah;</li> <li>3. Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang berlaku;</li> <li>4. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;</li> <li>5. Melakukan Publikasi dan Dokumentasi melalui media <i>offline</i> maupun <i>online</i>.</li> </ol>

<b>Tema RPD :</b>	<b>Maluku Maju dan Berkelanjutan</b>			
<b>Prioritas Pembangunan: 1</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif</b>			
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	3. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur Penunjang pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan;</li> <li>3. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada PD Induk dan 12 UPTD Pelayanan Penadapatan;</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani aparatur.</li> </ol>

<b>Tema RPD :</b>	<b>Maluku Maju dan Berkelanjutan</b>			
<b>Prioritas Pembangunan: 1</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif</b>			
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			4. Menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur;</li> <li>2. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi;</li> <li>3. Melakukan pengembangan pada sistem penerimaan Pendapatan Daerah secara digital terpadu yang mengakomodir layanan transaksi non tunai.</li> </ol>

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pada bab VI ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2025-2026. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada periode 2025-2026 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 18 (T-C.27.) Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

URUSAN : 5.02. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SKPD : 5.02.01.1. Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>						40.481.194.707,40							40.730.056.702,08		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					40.481.194.707,40								40.730.056.702,08		
	5.02	KEUANGAN					40.481.194.707,40								40.730.056.702,08		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	36.972.416.107,40						BNilai BNilai	37.166.517.530,08		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	372.817.998,70			-	1. Peningkatan Tata Kelola peryetenggaran pemerintah an yang akuntabel dan inovatif	-	100%	375.246.038,70		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			4 Dokumen	130.013.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola peryetenggaran pemerintah an yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	130.013.999,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			2 Laporan	242.803.999,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola peryetenggaran pemerintah an yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	245.232.039,70		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	24.312.266.067,10			-	1. Peningkatan Tata Kelola peryetenggaran pemerintah an yang akuntabel dan inovatif	-	100%	24.367.065.788,77		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan			97 Orang/ Bulan	23.648.050.000,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	97 Orang/ Bulan	23.648.050.000,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	151.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	152.857.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan			4 Laporan	512.872.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	566.758.348,67	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%			100 %	295.687.299,60			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	347.401.733,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			12 Laporan	295.087.299,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	347.401.733,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%			100 %	1.231.836.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.244.154.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	24 Dokumen			12 Dokumen	491.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	495.986.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	740.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	748.167.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100 %	326.551.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	328.316.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			15 Orang	176.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Orang	178.316.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	3.094.368.441,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	3.107.342.329,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	59.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	59.983.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	336.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	340.184.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	406.342.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	410.406.228,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			2 Paket	378.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	381.982.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	44 Laporan			11 Laporan	116.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Laporan	117.806.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			17 Laporan	1.796.979.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	1.796.979.641,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	1.599.430.301,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.599.537.180,01	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Paket			1 Paket	88.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	33 Paket	89.506.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	162 Unit			50 Unit	1.010.810.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	92 Unit	1.010.030.980,01	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	4.746.891.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	4.794.359.910,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			6 Laporan	84.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	85.324.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	1.334.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	1.347.889.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan			12 Laporan	3.327.867.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Laporan	3.361.145.670,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	992.568.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	1.002.493.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			30 Unit	484.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Unit	489.163.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit			108 Unit	133.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	108 Unit	135.041.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	22 Unit			2 Unit	374.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Unit	378.289.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	621.464.000,00						97,7 %	636.464.000,00	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%			100 %	621.464.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	636.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen			2 Dokumen	621.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	636.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	2.887.314.600,00						97,7 %	2.927.075.172,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	2.887.314.600,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	2.927.075.172,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan			4 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	404.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan			12 Laporan	1.134.297.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.151.083.986,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			7 Dokumen SSPD	1.133.017.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	1.149.791.186,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Laporan			4 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	222.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON						1.311.830.653,60							1.343.645.731,60	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.311.830.653,60							1.343.645.731,60	
	5.02	KEUANGAN						1.311.830.653,60							1.343.645.731,60	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai		B Nilai	1.081.830.653,60						BNilai	1.090.645.731,60	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	15.563.595,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	15.719.230,95	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			2 Dokumen	15.563.595,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	15.719.230,95	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	39.268.800,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	39.661.488,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	39.268.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	39.661.488,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%			100 %	21.816.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	22.034.160,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	21.816.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	22.034.160,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	384.371.458,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	388.215.172,58	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			12 Paket	8.911.230,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	9.000.342,30	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			12 Paket	1.965.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	1.985.114,60	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	134.217.794,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	135.559.971,94	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			12 Paket	12.962.340,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	13.091.963,40	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	44 Laporan			10 Laporan	18.493.100,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Laporan	18.678.031,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			15 Laporan	207.821.534,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	209.899.749,34	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	0,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Paket			32 Paket	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	33 Paket	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	162 Unit			20 Unit	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	92 Unit	0,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	461.104.853,60			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	463.712.673,60	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			12 Laporan	3.232.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	3.264.320,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBÓN KOTA AMBÓN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	257.550.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	260.125.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan			4 Laporan	200.322.853,60	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Laporan	200.322.853,60	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	159.705.947,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	161.303.006,47	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertiznannya	96 Unit			4 Unit	79.951.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Unit	80.751.116,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit			4 Unit	46.581.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	108 Unit	47.047.012,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	22 Unit			1 Unit	33.173.147,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Unit	33.504.878,47	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97.7 %			97.7 %	230.000.000,00						97.7 %	253.000.000,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	230.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	253.000.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	230.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	253.000.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON	
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH							503.153.487,50							533.655.022,38	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						503.153.487,50								533.655.022,38	
	5.02	KEUANGAN						503.153.487,50								533.655.022,38	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	220.153.487,50						BNilai BNilai	222.355.022,38		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	22.058.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	22.058.400,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	142.501.859,50			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	143.926.878,10	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	9.271.901,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	9.364.620,01	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	1.764.318,50	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	1.781.961,69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			1 Laporan	131.465.640,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	132.780.296,40	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	55.593.228,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	56.149.160,28	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			1 Laporan	1.212.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	1.224.120,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	35.026.800,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	35.377.068,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan			1 Laporan	19.354.428,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Laporan	19.547.972,28	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	283.000.000,00						97,7 %	311.300.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	283.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	311.300.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	283.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	311.300.000,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH
UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT								403.987.362,88							423.984.731,51	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						403.987.362,88							423.984.731,51	
	5.02	KEUANGAN						403.987.362,88							423.984.731,51	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	226.681.862,88						BNilai BNilai	228.948.681,51	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	22.058.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	22.058.400,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	100.072.160,88			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	101.072.882,49	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	3.338.454,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	3.371.838,54	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	9.921.331,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	10.020.544,31	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	11.480.455,88	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	11.595.260,44	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	5.125.750,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	5.177.007,50	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			1 Laporan	130.206.170,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	131.508.231,70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			100 %	27.817.420,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	28.095.594,20	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			1 Laporan	1.818.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	1.836.180,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	17.586.120,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	17.761.981,20	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan			1 Laporan	8.413.300,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Laporan	8.497.433,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			100 %	16.733.882,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	16.901.220,82	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			3 Unit	12.516.122,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Unit	12.641.283,22	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	22 Unit			2 Unit	4.217.760,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Unit	4.259.937,60	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	177.305.500,00						97,7 %	195.036.050,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	177.305.500,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	195.036.050,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	177.305.500,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	195.036.050,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU							503.999.949,50							525.287.406,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						503.999.949,50							525.287.406,00		
	5.02	KEUANGAN						503.999.949,50							525.287.406,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	323.472.649,50						BNilai BNilai	326.707.376,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	28.966.800,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	29.256.468,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.02.0003	Petaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	28.966.800,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	29.256.468,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	175.984.369,50			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	177.744.213,20	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	2.181.852,50	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	2.203.671,03	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	15.659.040,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	15.815.630,40	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	24.484.622,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	24.729.468,22	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	5.328.255,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	5.381.537,55	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			1 Laporan	128.330.600,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	129.613.906,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	58.176.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	58.757.700,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			1 Laporan	1.212.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	1.224.120,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	56.964.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	57.533.640,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	60.345.480,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	60.948.934,80	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			3 Unit	40.014.180,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Unit	40.414.321,80	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit			1 Unit	14.271.300,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	108 Unit	14.414.013,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit			2 Unit	6.060.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Unit	6.120.600,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	180.527.300,00						97,7 %	198.580.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	180.527.300,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	198.580.030,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	180.527.300,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	198.580.030,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU
		<b>UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT</b>						<b>402.146.794,50</b>							<b>423.480.957,65</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>402.146.794,50</b>							<b>423.480.957,65</b>	
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>402.146.794,50</b>							<b>423.480.957,65</b>	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	209.783.514,50						BNilai BNilai	211.881.349,65	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	22.058.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	22.058.400,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	102.430.614,50			-	1. Peningkatan Tata Kelola perny enggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100%	103.454.920,65	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	824.160,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	832.401,60	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	5.646.354,50	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	5.702.818,05	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	10.523.190,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	10.628.421,90	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	3.939.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	3.978.390,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			1 Laporan	81.497.910,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola perny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	82.312.889,10	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	80.446.500,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	81.250.965,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			1 Laporan	3.939.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	3.978.390,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	31.057.500,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	31.368.075,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan			1 Laporan	45.450.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Laporan	45.904.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	4.848.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	4.896.480,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			4 Unit	4.848.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Unit	4.896.480,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	192.363.280,00						97,7 %	211.599.608,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	192.363.280,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	211.599.608,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	192.363.280,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	211.599.608,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA							402.498.314,31						425.066.156,75	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						402.498.314,31							425.066.156,75	
	5.02	KEUANGAN						402.498.314,31							425.066.156,75	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP	BNilai BNilai			B Nilai B Nilai	196.466.544,31						BNilai BNilai	198.431.209,75	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	22.058.400,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			1 Dokumen	22.058.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Dokumen	22.278.984,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100 %	5.050.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	5.100.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	5.050.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	5.100.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	78.236.954,31			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	79.019.323,85	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	1.354.349,40	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	1.367.892,89	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket			1 Paket	20.176.770,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	17 Paket	20.378.537,70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			1 Paket	11.574.489,91	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	18 Paket	11.690.234,81	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket			1 Paket	6.517.025,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	19 Paket	6.582.195,25	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	44 Laporan			1 Laporan	3.272.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	22 Laporan	3.305.124,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan			1 Laporan	35.341.920,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	37 Laporan	35.695.339,20	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			100 %	49.288.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	49.780.880,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46 Laporan			1 Laporan	2.626.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	23 Laporan	2.652.260,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168 Laporan			12 Laporan	46.662.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	84 Laporan	47.128.620,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			100 %	41.833.190,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	42.251.521,90	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			4 Unit	22.239.190,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	48 Urut	22.461.581,90	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit			1 Unit	4.444.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	108 Unit	4.488.440,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit			2 Unit	15.150.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	11 Unit	15.301.500,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7 %			97,7 %	206.031.770,00						97,7 %	226.634.947,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%			100 %	206.031.770,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100%	226.634.947,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	26 Dokumen SSPD			1 Dokumen SSPD	206.031.770,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Dokumen SSPD	226.634.947,00	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
<b>JUMLAH</b>								<b>44.008.811.269,69</b>							<b>44.405.176.707,97</b>	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

### 7.1. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Adapun target keberhasilan, pencapaian, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7%	98%
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B	B
			Nilai Sakip	B	B

**7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

*Tabel 20 (Tabel T-C.28) INDIKATOR KINERJA KUNCI*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Dasar Pertimbangan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	Menghitung Efektifitas Pendapatan Daerah (Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu)	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Kuantitatif dari berbagai pertanyaan dalam survey	Laporan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB
			Nilai Sakip	Nilai Evaluasi Sakip	Laporan Evaluasi Sakip dari Inspektorat

Tabel 21 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,7%	98%	
2.	Indeks Pelayanan Publik		B	B	
3.	Nilai Sakip		B	B	

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, sehingga sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026.

Penyusunan Rencana Srategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026, menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas pokok organisasi, yaitu mengkoordinasikan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Renstra ini juga akan dijadikan pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja (RENJA), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan daerah Provinsi Maluku sekaligus menjaga fokus sasaran serta tugas dan fungsi Bapenda Maluku. Sehingga Tujuan Bapenda Provinsi Maluku tahun 2025-2026, yaitu: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah”**, dengan Sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

Kedua sasaran tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Maluku diantaranya:

- 1) Efektifitas Pendapatan Daerah;
- 2) Indeks Pelayanan Publik; dan
- 3) Nilai SAKIP.

Keberhasilan pencapaian seluruh indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada didalamnya, terutama komitmen, profesionalitas, dan sikap mental sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada saat yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, dalam mendukung Rencana Strategis ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 yaitu **“MALUKU MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.

Ambon, Maret 2024

**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Maluku**



**INA WATI TAHIR, SE.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19780924 200112 2 002



PROVINSI MALUKU

